

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah menjalani Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa untuk kegiatan PKPA selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memulai kegiatan PKPA, mahasiswa program studi profesi apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan pengetahuan tentang kegiatan kefarmasian di Apotek, seperti undang-undang kefarmasian, pengetahuan farmakoterapi dan manajemen Apotek.
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaknya berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan seluruh kegiatan PKPA agar dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek guna membekali diri ketika harus terjun di dunia kerja.

Saran yang dapat disampaikan kepada apotek kimia farma 24 Dharmawangsa adalah:

1. Apotek Kimia Karma disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kefarmasian kepada pasien serta untuk menjalankan peran apoteker dalam memonitoring efek terapi pasien.
2. Apotek Kimia Farma diharapkan untuk terus mengingatkan kembali petugas dalam meracik obat sebaiknya menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk mencegah terjadinya penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Canadian Institutes of Health Research, 2016, <http://www.drugbanks.com> diakses pada 26 Februari 2018.
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI. *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma*. Depkes RI : Jakarta. 2007
- Firmansyah,M, 2009, *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan*, Transmedia : Jakarta
- Lacy, C.F., Amstrong, L.L., Goldman, M.P., Lanco, L.L. 2009, *Drug Information Handbook 17th ed*, American Pharmacist Assiciation, USA.
- McEvoy, G.K., Snow, E.K., Kester L., Litvak, K., Miller, J.L., Welsh, O.H., O'Rourke, A., Le, T. 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Inc., USA.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran,

- Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Peraturan Presiden RI, 2009a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Peraturan Presiden RI, 2009b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Quick, J.D., Rankin, J.R., Laing, R.O., O'Connor, R.W., Hogerzeil, H.V., Diakses, M.N.G., Garnett, A., 1997, *Managing Drug Supply*, Second Edition, revised and expanded, Kumarin Press, West Harford.
- Seto, S., Yunita, N., Lily, T., 2012, *Manajemen Farmasi*, Ed. 3, Airlangga University Press: Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, Thirty Sixth Edition, Pharmaceutical Press, New York.
- Tatro, D.S., Borgsdorf, L.R., Catalano, J.T. 2003, *A to Z Drug Fact 2nd Edition*, Fact and Comparison, the University of Michigan.